

lebih tinggi namun untuk perguruan tinggi harus keluar dari kecamatan pakuniran karena di kecamatan pakuniran tidak tersedia.

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, dengan adanya pendidikan kelak mereka akan bisa membangun suatu masyarakat yang maju. Adanya pendidikan ini juga akan mempengaruhi taraf hidup mereka. Adanya pendidikan yang cukup memadai, mereka bisa mengembangkan bakat dan kreativitas mereka yang nantinya dapat dijadikan penghasilan ekonomi ataupun lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar. Dilihat dari tingkat pendidikan yang ada, bisa dikatakan bahwa Desa Pakuniran masih kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Dari data yang diperoleh dari monografi kecamatan Pakuniran termasuk di dalamnya Desa Pakuniran, kebanyakan dari mereka mengenyam pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar (SD).

Kurangnya pengetahuan akan pentingnya pendidikan ini membuat mereka susah untuk mencari pekerjaan baru yang bisa dikatakan lebih baik dari pekerjaan sehari-hari mereka yang kebanyakan menjadi petani. Dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada, perlunya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dan warga sekitar. Adanya pandangan yang sama tentang pentingnya pendidikan akan memudahkan mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya kejenjang yang lebih tinggi.

dirasakan oleh masyarakat tidak terlalu diperhatikan seperti jalan yang rusak, saluran irigasi yang menyumbat dan lain sebagainya.

Tak dapat di pungkiri bahwa pertambangan yang terletak di sungai pancar glagas ini ada campur tangan politik di dalamnya. Bisa dikatakan Kabupaten Probolinggo dapat digolongkan dalam suatu pemerintahan otoriter yang mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu kepemimpinan.

Seperti yang disampaikan oleh bapak jumanto dalam forum audiensi dengan komisi D di ruang banmus gedung DPRD JATIM, tepatnya pada tanggal 13 maret 2017 pengaduan tentang pertambangan illegal di sungai pancar glagas perwakilan dari masyarakat, ia menyatakan bahwa jika mereka melakukan laporan ke polres, kepada polda jawa timur. Menurutnya ada kejadian pada beberapa waktu yang lalu salah satu tokoh masyarakat di datangi oleh 100 banser yang mendatangi rumahnya hanya karena menkritiki tentang masalah pertambangan dan sebagainya tersebut, ia juga mengatakan dalam forum tersebut bahwa polisi pura-pura tidak mengetahui karena jika polisi suara apalagi bertindak takut akan di pindahkan tempat dinas ketempat yang terpencil, tapi sampai saat ini tidak ada yang bersuara, iya juga menyampaikan pesan terhadap kapolda jatim melalui ibu kapolsek karena pada saat itu kapolda jawa timur tidak hadir dalam pertemuan tersebut bahwa ada tuduhan masyarakat Prrobolinggo seperti yang disampaikan bahwa tidak ada yang berani

memberanikan diri untuk menghadapinya, kepala desa pun takut untuk turun tangan karena selalu diawasi oleh pemerintah kabupaten yang mana bupati saat ini adalah adik ipar dari pengusaha tersebut. Menurut keterangan dari salah satu perangkat desa jika desa tidak mengikuti peraturan dari bupati maka semua dana-dana bantuan tidak akan dicairkan (diberikan) ke desa, perangkat desa yang sadar bahwa tidak akan membiarkan masalah (pertambangan) ini terus berlarut-larut adalah salah besar, perangkat desa dan BPD maka berinisiatif untuk melakukan tindakan yang tidak mengatasnakan pihak desa karena system pemerintahan di desa pakuniran saat ini memang sudah kacau semua harus menurut perintah kepala desa bahkan BPD pun harus mengikuti perintah kepala desa sungguh miris sekali, salah satunya upaya yang dilakukan adalah melakukan demo tepatnya pada bulan februari lalu, BPD, perangkat desa, serta tokoh-tokoh masyarakat bersatu melakukan aksi demo tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak sholehuddin selaku bendahara Desa Pakuniran

“kami secara internal (dari pihak desa) juga sering bermusyawarah kecil-kecilan mengenai permasalahan ini, sebenarnya repot seumpama di laporkan dan SPPT nya di serahkan semua, di lihat nama-namanya banyak yang mampu terus gaimana dengan yang tidak mampu, rencananya kan mau bantu yang tidak mampu, kalau itu di lakukan apa nanti yang tidak mampu tambah tumpul, ya

memberikan kontribusi terhadap persoalan globalisasi. Hal ini berkaitan dengan teori marxisme yang cenderung lebih relevan dalam menjawab permasalahan masa kini apabila dibandingkan dengan masa awal munculnya teori ini. Marxisme dianggap sebagai pandangan yang dapat meramalkan keadaan dunia yang berkembang seiring dengan tumbuhnya kapitalisme. Tidak seperti liberalisme dan realisme, marxisme menggali lebih dalam mengenai politik dunia. Marxisme beranggapan bahwa memahami politik dunia berarti mencari pemahaman lebih jauh mengenai kapitalisme global.⁶¹

Realita yang ada dalam penelitian ini bisa dikatakan pengusaha menggunakan sistem politik untuk menguasai pertambangan pasir dan batu yang ada di desa pakuniran Kecamatan pakuniran kabupaten Probolinggo, proses pengambil alihan pengelolaan lahan yang ada di sungai pancar glagas melalui pemerintahan desa setempat, disini terdapat keanehan-keanehan bahwa aliran sungai yang memiliki potensi tambang pasir dari ujung selatan sampai ujung selatan hanya mau di kuasai oleh satu orang saja, beralihnya pertambangan menjadi milik pengusaha pada saat itu juga telah beralih alat yang awalnya memakai alat manual atau tradisional menjadi menggunakan alat berat sekitar pada tahun 2014 dan hal itupun di ketahui oleh penegak hukum, dan di ketahui pula bahwa dalam menambang tersebut menggunakan solar bersubsidi karena pengusaha tersebut juga memiliki pon bensin, yang

⁶¹ Stephen Hobden, & Jones, Richard W., 2001. *Marxist Theories of International Relations*, dalam Baylish, John & Smith, Steve (eds), *The Globalization of World Politics an Introduction to International Relations*, New York: Oxford University Press

terjadi pada kasus pertambangan ilegal di sungai Pancar Glagas bahwa pengusaha berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari pertambangan tersebut dengan cara mengambil alih paksa pengelolaan yang kelola oleh masyarakat kelas bawah hanya di tukar dengan uang yang tidak seberapa nilainya. Namun masyarakat kelas bawah tetap menerima apa yang dilakukan oleh pengusaha karena mereka diancam jika tidak memberikan hak pengelolaan tersebut maka hak mereka akan dicabut oleh pihak perairan dengan tidak mendapatkan apa-apa. Masyarakat kelas bawah berfikir lebih baik diberikan kepada pengusaha dengan mendapatkan uang sebagai *pesangon* dari pada izin pengelolaan tersebut di cabut oleh pihak pengairan tanpa mendapatkan uang. Mereka melakukan hal itu tanpa memikirkan jangka panjangnya seperti dampak yang akan mereka rasakan kalo di berikan kepada pengusaha, mereka hanya melihat uangnya karena memang kondisi ekonominya kelas bawah rendah. Disadari atau tidak masyarakat kelas bawah telah mengalami penindasan dari kelas atas (pengusaha yang bertingkah semaunya sendiri)

Berdasarkan pendapat dari DPRD komisi D dalam forum pengaduan terkait masalah tambang, menyatakan bahwa pihaknya akan menyikapi sesuai dengan kewenangannya kata beliau padahal warga pakuniran mendatangi kantor tersebut untuk pengaduan dan meminta keadilan karena sudah berkali-kali melakukan pengaduan dan tuntutan terhadap pertambangan tersebut

glagas. Aktivitas-aktivitas pengrusakan alam tersebut tidak lain merupakan harga mahal yang harus dibayar mahal oleh masyarakat setempat dan generasi dimasa depan demi kelangsungan proses produksi besar-besaran yang dimiliki oleh para Kapitalis. Aktivitas penambangan selalu tidak sesuai dengan standar yang ada untuk menjadikan daya rusak aktivitas tersebut dapat ditanggulangi. Semua mekanisme, termasuk juga AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dengan mudah dilewati. Semua bisa dibeli.

Masalahnya adalah dari orang-orang yang ikut menikmati hasil pertambangan yang dilakukan oleh para Kapitalis (pengusaha); ataupun juga kita juga bagian dari kelas-kelas pekerja yang bergantung hidup dari pertambangan tersebut, dan juga sebagian dari masyarakat untuk bekerja pada Kapitalisme yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kebutuhan yang perlu kita maklumi. Hal ini menjadi masalah serius ketika kerusakan yang selama ini yang masyarakat rasakan akibat pertambangan ini begitu sangat meresahkan karena dibiarkan akibat ketakutan masyarakat takut tidak dapat bekerja di di sungai pancar glagas ini oleh si pengusaha tadi, karena masyarakat sendiri pun masih butuh terhadap pertambangan tersebut.